

PENGORGANISASIAN DAN DAMPAK PENGEMBANGAN EKOWISATA BERKELANJUTAN, DESA BUDAYA KERTALANGU, KOTA DENPASAR

Byna Kameswara¹, Suhirman Suhirman²

¹Institut Teknologi Nasional Bandung, kameswara.byna@itenas.ac.id

²Institut Teknologi Bandung, eshm2009@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu bagian dari potensi ekonomi di Indonesia. Ada banyak jenis pariwisata, salah satunya adalah ekowisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata merupakan hal yang penting. Partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk menimbulkan rasa kepemilikan terhadap pengembangan ekowisata. Salah satu contohnya adalah di Desa Budaya Kertalangu. Partisipasi masyarakat ini didukung oleh pengorganisasian komunitas atau masyarakat yang bertahap. Tahapan tersebut seperti tahapan integrasi, tahapan pemetaan isu, permasalahan, dan potensi desa, tahapan merancang tindakan bersama, tahapan implementasi, tahapan monitoring dan evaluasi, tahapan refleksi, dan tahapan umpan balik. Tahapan ini merupakan siklus yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan setiap tahap ini tentunya akan memberikan dampak pada penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kata-kunci: Ekowisata, Pengorganisasian Komunitas, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Tourism is one part of the economic potential in Indonesia. There are many types of tourism, one of which is ecotourism. Community participation in the development of ecotourism is important. This community participation aims to create a sense of ownership towards the development of ecotourism. One example is in the Cultural Village of Kertalangu. Community participation is supported by gradual community organizing. These stages such as the integration stage, the stage of mapping issues, problems, and potentials of the village, the stage of designing joint actions, the stages of implementation, the stages of monitoring and evaluation, the stages of reflection, and the stages of feedback. This stage is a continuous cycle. The implementation of each stage will certainly have an impact on the application of the concept of sustainable development.

Keywords: *Ecotourism, Community Organizing, Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Beragam budaya dan kelestarian alam menjadi daya tarik tersendiri untuk Indonesia. Hal itu juga yang menjadi potensi besar bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Contoh potensi tersebut dapat

dilihat disalah satu pulau Indonesia yaitu Pulau Bali.

Ada banyak segmentasi dari pariwisata. Contoh agrowisata, ekowisata, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, dan lain-lain. Potensi sistem SUBAK dalam pariwisata dapat dikategorikan kedalam bagian pariwisata yaitu ekowisata. Menurut Diamantis (1999) ekowisata

merupakan pariwisata berbasis alam yang difokuskan pada pembelajaran terhadap peluang sekaligus memberikan manfaat secara lokal atau wilayah yang lebih luas, serta menunjukkan proses keberlanjutan pada sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya.

SUBAK (bali culture landscape) ditetapkan menjadi warisan budaya dunia (World Heritage) oleh UNESCO (United Nation Education Scientific and Cultural Organization). SUBAK Bali merupakan komunitas atau organisasi yang pengelolaannya dikerjakan oleh masyarakat Bali sendiri secara khusus terkait dengan sistem pengairan fungsi kawasan persawahan tradisional. UNESCO menilai sistem SUBAK merupakan sistem irigasi yang tetap dapat menjaga kelestarian budaya dan juga tetap merekatkan nilai sosial masyarakat Bali. Semenjak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia SUBAK terus dikunjungi para wisatawan. Keindahan kawasan terasering SUBAK menjadi fokus utama dari tujuan kedatangan wisatawan. Potensi wisata SUBAK berkembang karena didukung dan dikembangkan langsung oleh komunitas budaya atau masyarakat sekitar sendiri yaitu oleh petani sekaligus pemuka adat yang tetap menjaga kelestarian sistem SUBAK.

Komunitas atau masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan. Komunitas juga merupakan bagian yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu perencanaan dapat dilaksanakan. Perencanaan dan pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan berhasil jika adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tersebut. Menurut Maser (1997), komunitas adalah sekelompok orang dalam suatu pemerintahan tingkat lokal tertentu yang sama, dimana kelompok orang tersebut memiliki keinginan yang sama. Ada banyak jenis komunitas yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam pengorganisasian yang baik komunitas atau masyarakat merupakan bagian penting. Masyarakat

menjadi elemen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Masyarakat dikatakan berperan dalam perencanaan dimana masyarakat menjadi peran utama dalam menentukan program-program dan strategi-strategi yang akan dilaksanakan. Dengan berperannya masyarakat tentunya masyarakat juga yang menerima dampak atau manfaat langsung maupun tidak langsung dari pengorganisasian. Besar kecilnya dampak atau manfaat ini ditentukan oleh seberapa baik kualitas pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas tersebut (Pitana & Gayatri, 2005). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tahapan pengorganisasian dan dampak pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu.

KAJIAN LITERATUR

Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya peningkatan ekonomi sektor pariwisata salah satunya konsep ekowisata berkelanjutan. Ekowisata berkelanjutan ini menekankan pada bagaimana kegiatan wisata yaitu ekowisata dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh elemen atau pihak yang terkait. Pariwisata berkelanjutan memiliki makna terhadap konservasi alam dan sumber daya wisata, pelibatan masyarakat lokal, peragaman pengalaman wisata yang disediakan, menjaga kekayaan budaya setempat, dan usaha peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat local (Fandeli, 2000). Pengembangan ekowisata berkelanjutan banyak dibahas oleh beberapa ahli salah satunya adalah United Nations Commission on Sustainable Development (dalam sidang sesi ke 8 tahun 2000) menyatakan bahwa ekowisata adalah *sustainable tourism* yang : (1) Menjamin partisipasi yang setara, efektif, dan aktif dari seluruh stakeholder; (2) Menjamin partisipasi penduduk lokal menyatakan iya atau tidak dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan, dan

wilayah; (3) Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan pemeliharaan sumber daya.

Tabel 1
Indikator Tahapan Dari Beberapa Ahli Dan Hasil Sintesis

| No. | Poin poin dalam tahapan pengorganisasian komunitas | A | B | C | D |
|-----|--|---|---|---|---|
| 1 | Membangun kepercayaan dengan masyarakat | | v | v | v |
| 2 | Analisis Tujuan pengembangan | | v | | v |
| 3 | Analisis permasalahan dan potensi | v | | | v |
| 4 | Pemetaan sosial dan kelompok kerja | | v | v | v |
| 5 | Perumusan tindakan bersama | v | v | v | v |
| 6 | Pembentukan organisasi atau unit pelaksana dan pengelola | | | v | |
| 7 | Pembentukan <i>role play</i> | | v | | |
| 8 | implementasi | v | v | v | v |
| 9 | <i>Monitoring</i> dan evaluasi | | v | v | v |
| 10 | <i>Reflection</i> | | v | v | v |
| 11 | <i>Feedback</i> | | v | | v |

Sumber: Paulo Freire (1999); Duthy & Bolo-Duthy, (2003); Wicaksono & Darusman, (2001)

A: Paulo Freire (1999) & Chaskin (2001)

B: Duthy & Bolo-Duthy, (2003)

C: Wicaksono & Darusman, (2001)

D: Penulis (2013)

Ada banyak stakeholder yang berperan dalam pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata dari berbagai literatur seperti Damanik & Weber (2006), Lickorish & Jenkins (2007); Nugroho, (2011); Wicaksono & Darusman (2001) dapat

disintesis bahwa ada tiga kelompok stakeholder dalam pengembangan ekowisata yaitu : (1) *Public Sector Stakeholder*; (2) *Private Sector Stakeholder*; (3) *Community Stakeholder*.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata didukung oleh konsep pengorganisasian komunitas. Duthy & Bolo-Duthy (2003) menyebutkan tahapan dalam pengorganisasian komunitas yaitu : (1) *Integration*, (2) *Social investigation or community study*; (3) *Issue identification and analysis*; (4) *Core group formation*; (5) *Ground work and community meeting*; (6) *Role playing*; (7) *Mobilization or action*; (8) *Evaluation and/or reflection*; (9) *Formalization of the community – based organization*; (10) *Phase out*.

Dari berbagai literatur yang telah disebutkan dapat disintesis tahapan pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata. Tahapan tersebut adalah : (1) Tahapan Integrasi; (2) Pemetaan Isu, Pemasalahan, Dan Potensi Komunitas Terkait Ekowisata; (3) Merancang Tindakan-Tindakan Bersama Pengembangan Ekowisata; (4) Implementasi Kegiatan Rancangan Pengembangan Ekowisata; (5) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekowisata; (6) Refleksi Keberjalanan Pengembangan Ekowisata; (7) Feedback.

Dalam pengorganisasian komunitas, dampak merupakan salah satu pertimbangan dalam setiap tahapan. Untuk mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan, dampak dari hasil pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata dibagi menjadi 3 indikator yaitu dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini merupakan hasil sintesis dari berbagai literatur seperti Soemarwoto (1997), Yoeti (2008), Dewi & Rosyidie (2008) dan Nugroho (2011).

1. Dampak ekonomi yang dapat ditunjukkan dengan 3 subindikator yaitu perubahan jumlah tenaga

- kerja, perubahan jumlah peluang usaha, dan perubahan status kepemilikan tanah masyarakat
2. Dampak sosial yang ditunjukkan dengan 3 subindikator yaitu perubahan mata pencaharian dan perubahan budaya masyarakat
 3. Dampak lingkungan ditunjukkan dengan aspek kebersihan dan polusi akibat kendaraan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *single case study*. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kerangka kontekstual dan teori yang ada dengan implementasinya di lapangan. Pendekatan ini didukung dengan metode penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian ini indikator dan subindikator diturunkan dari setiap sasaran. Indikator dan sub indikator ini yang menjadi dasar dalam pembentukan perangkat survey.

Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada ketiga sasaran. Penentuan narasumber dalam wawancara mendalam ini dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan indikator dan subindikator. Untuk sasaran pertama dan kedua wawancara mendalam dilakukan kepada 8 tokoh kunci dari berbagai peran dalam pengembangan ekowisata. Sedangkan untuk sasaran 3, wawancara mendalam dilakukan kepada 11 kepala dusun. Dengan pertimbangan bahwa kepala dusun merupakan perwakilan masyarakat dalam sistem komunikasi antara pengelola Desa Budaya Kertalangu dengan pemerintah desa sebagai penanggung jawab utama ekowisata.

PEMBAHASAN

Potensi wisata yang ada di kawasan ekowisata Desa Budaya Kertalangu terbagi menjadi dua yaitu potensi budaya dan potensi alam. Potensi budaya secara umum adalah

kebiasaan dan sikap perilaku masyarakat Bali termasuk adat istiadat dan kesenian. Potensi alam yang paling utama adalah persawahan yang menciptakan suasana pedesaan di Desa Budaya Kertalangu. Di dalam kawasan ekowisata Desa Budaya Kertalangu terdapat unit-unit yang menjadi fasilitas desa wisata seperti *jogging track*, fasilitas outbound, kolam pemancingan, rumah makan, pusat SPA, Gong Perdamaian Dunia, pusat oleh-oleh, dan pusat kerajinan gerabah dan kaca.



Gambar 1

Jogging track yang mengelilingi area persawahan.

Sumber: Survey Lapangan (2013)



Gambar 2

Pusat kerajinan kaca Desa Budaya Kertalangu

Sumber: Survey Lapangan (2013)

Analisis Peran Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pengorganisasian Komunitas

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana peran dari ketiga elemen atau pihak yang berperan dalam pengembangan Ekowisata di Desa Budaya Kertalangu. Secara garis besar pihak tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum yaitu masyarakat Desa Kasiman Kertalangu.

Peran pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam kebijakan, dimana pemerintah memberikan dukungan legalitas atas kegiatan yang ada di dalam mendirikan Desa Budaya Kertalangu. Selain itu pemerintah juga berperan memberikan dorongan dalam hal pengembangan masyarakat di kawasan Desa Budaya Kertalangu. seperti memberikan bantuan ikan dan itik serta pengadaan pelatihan dan penyuluhan pertanian modern yang ada. Selain berperan dalam wewenangnya mengatur kebijakan, pemerintah juga mempromosikan desa wisata yang terintegrasi dengan visi misi Kota Denpasar dan dengan objek-objek wisata lain di Kota Denpasar. Bentuk promosi ini selain usaha *marketing* yang ada adalah dengan mengarahkan beberapa kegiatan pemerintah seperti rapat atau kunjungan kenegaraan yang diarahkan menuju Desa Budaya Kertalangu.

Peran kedua dijalankan oleh *private sector*. *Private sector* yang dimaksud di sini adalah pihak Swasta. Peran swasta dalam pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu didominasi oleh PT. Uber Sari. PT. Uber Sari disini berperan sebagai pengelola utama dari Desa Budaya Kertalangu. Pengelola dapat diartikan pihak yang berwenang dalam hal operasional pengembangan. PT. Uber Sari juga berperan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung Desa Budaya Kertalangu. Dalam pembangunan fisik PT. Uber Sari juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan fisik dari Desa Budaya Kertalangu. Hal ini juga untuk mendukung adanya dampak ekonomi serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Desa Budaya Kertalangu. Selain peran yang telah disebutkan PT Uber Sari juga berperan sebagai koordinator dari investor-investor yang bergabung dalam pengembangan desa wisata.

Menurut Bapak Dewa Kaler, peran utama masyarakat adalah penyedia sumber daya yang mendukung

pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu. Sumber daya yang dimaksud di sini seperti sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada. Sumber daya manusia seperti contoh pemerintah desa yang memastikan adanya tenaga kerja yang diserap oleh Desa Budaya Kertalangu. Sedangkan sumber daya alam seperti contoh lahan persawahan yang dikontrakan oleh para petani sebagai potensi utama dalam Ekowisata di Desa Budaya Kertalangu. selain masyarakat ada juga komunitas-komunitas yang juga ikut serta dalam pengembangan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti organisasi SUBAK dan desa adat. Organisasi Subak yang berperan dalam mengarahkan dan mengawasi kegiatan bercocok tanam para petani juga ikut ambil andil dalam pengembangan ekowisata. Begitu juga dengan Desa Adat yang berwenang dalam hal budaya dan keagamaan yang juga menjadi potensi dalam atraksi Desa Budaya Kertalangu.

Masyarakat juga ikut serta dalam hal mengawasi beriringan dengan pemerintah. Masyarakat ikut mengawasi keberjalanan pengembangan Desa Budaya Kertalangu. masyarakat ikut langsung dalam pengawasan karena masyarakatlah yang langsung terlibat dalam pengelolaan. Namun *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan masyarakat harus tetap melalui pemerintah yaitu melalui masing-masing banjar yang diwakilkan oleh Kepala Dusun.

Tabel 2

Hasil Analisis Peran Dari Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat

| No | Pihak | Peran dalam pengembangan ekowisata |
|----|-------|------------------------------------|
|----|-------|------------------------------------|

| No | Pihak | Peran dalam pengembangan ekowisata |
|----|------------|---|
| 1 | Pemerintah | a. Yang berwenang dalam mengatur kebijakan, semua peraturan yang dapat mendorong perkembangan desa wisata b. Mengawasi pengembangan desa wisata agar sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada c. Mempromosikan desa wisata yang terintegrasi dengan objek wisata di Kota Denpasar |
| 2 | Swasta | a. Sebagai pengelola dalam pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu b. Mengkoordinasikan seluruh investor yang terlibat c. Memberikan pengembangan kapasitas kepada masyarakat dalam hal penyuluhan dan pelatihan |
| 3 | Masyarakat | a. Masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan sebagai pendukung sumber daya dan potensi ekowisata b. Masyarakat ikut serta mengawasi pengembangan ekowisata c. Kelompok-kelompok masyarakat ikut mendukung, seperti organisasi SUBAK dan Desa Adat |

Sumber: Hasil Analisis Data (2013)

Analisis Tahapan Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Ekowisata

Dalam pengorganisasian masyarakat atau komunitas ketiga pihak yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam menjalani peran masing-masing dalam pengorganisasian komunitas atau masyarakat ketiga menjalankan dalam tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini bersifat siklus. Tahapan ini bersifat kontinuitas, artinya tahapan ini tidak terputus namun akan terus berjalan sepanjang proses pengembangan ekowisata Desa Budaya Kertalangu.

Tahapan pertama adalah integrasi. Pada tahapan integrasi hal yang paling penting adalah membangun kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan diskusi bersama dengan masyarakat dan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu pendekatan ini dilakukan oleh bapak Dewa rai kepada elemen-elemen desa seperti desa dinas, SUBAK, desa adat dan masyarakat yang diwakilkan oleh kepala dusun. Pendekatan ini dapat dikatakan tidak begitu sulit, hal ini dikarenakan aspek budaya yang sangat “kental” di Bali sehingga sisi kepemimpinan atau keterwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat ini membuat pendekatan ini terbilang tidak membutuhkan waktu yang lama dan banyak kendala. Dalam tahap ini juga dilakukan tahap awal analisis sosial masyarakat. Hal ini dilakukan tokoh inisiator yaitu bapak Dewa rai. Bapak Dewa rai melakukan analisis sosial masyarakat dengan melihat keadaan persawahan yang dimiliki para petani tidak produktif sedangkan adanya dorongan untuk tetap mempertahankan persawahan untuk mendukung jalur hijau yang ditetapkan pemerintah. Analisis sosial masyarakat ini dilakukan tidak kepada seluruh

masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. namun hanya dilakukan kepada kelompok petani.

Tahap kedua adalah pemetaan isu atau tujuan serta potensi dan permasalahan masyarakat atau komunitas. Pada tahapan ini yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pelibatan masyarakat dalam merumuskan isu, permasalahan, dan potensi desa untuk pengembangan desa wisata. Seperti yang dijelaskan pada tahap integrasi, aspek budaya yang sangat kental di Bali membuat sistem kepemimpinan atau keterwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat sangat kuat. Hal ini juga terjadi pada tahapan pemetaan isu, permasalahan dan potensi. Setiap kelompok masyarakat diwakilkan oleh tokoh masyarakat masing-masing dalam diskusi pemetaan isu, permasalahan dan potensi ini.

Dalam pengembangan Desa Budaya Kertalangu ada hal yang menjadi pertimbangan. Hal-hal tersebut seperti:

1. Potensi Alam dan budaya

Potensi alam yang ada adalah area persawahan. Desa kasiman Kertalangu merupakan salah satu desa di Kota Denpasar yang masih memiliki lahan persawahan yang produktif. Hal ini juga didukung dengan adanya SUBAK yang masih tetap dilestarikan. Selain potensi alam Desa Kasiman Kertalangu juga didukung oleh keberadaan desa adat yang tetap mempertahankan kesenian dan kebudayaan untuk tetap lestari.

2. Dukungan infrastruktur

Desa Kasiman Kertalangu yang berada di Kota Denpasar juga dapat dikatakan memiliki dukungan infrastruktur yang baik. Hal ini ditunjukkan lokasi desa Kasiman Kertalangu yang di lewati jalan raya By Pass Ngurah Rai. Masyarakat Desa kasiman Kertalangu juga banyak yang membuka usaha *kost-kostan* yang dapat mendukung dari sisi tempat tinggal bagi wisatawan yang datang ke Denpasar secara umum.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan merancang tindakan bersama. Pada tahap ini hal yang ditekankan tidak berbeda jauh dengan tahapan sebelumnya. Masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan setiap strategi yang ada dalam pengembangan desa wisata. Strategi ini yang nantinya akan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah, pihak swasta yaitu PT. Uber Sari dan masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Namun dari beberapa narasumber diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam merencanakan strategi bersama dalam pengembangan desa wisata hanya sebatas perencanaan pengembangan desa wisata. Sedikit sekali peran masyarakat yang diikutsertakan dalam merumuskan strategi dalam pengelolaan desa wisata. Partisipasi masyarakat hanya pada tahap merumuskan strategi tahap awal pengembangan ekowisata. Sedikit sekali peran masyarakat dalam merumuskan strategi pengelolaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan secara penuh sudah dimandatkan kepada pihak swasta yang berbentuk perusahaan yaitu PT Uber Sari oleh pemerintah Desa Kasiman Kertalangu.

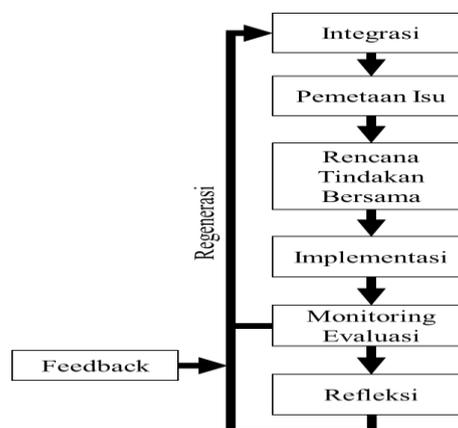
Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Seperti yang dijelaskan di tahap sebelumnya, pada tahap implementasi lebih banyak peran swasta yaitu PT. Uber Sari. walaupun pada awal-awal pembangunan desa wisata partisipasi masyarakat masih sangat terasa dalam hal pembangunan fisik, atraksi kebudayaan, industri kecil terutama makanan. Namun semakin berkembang peran masyarakat sangat kecil, hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama kualitas tenaga kerja yang semakin tinggi dan pekerjaan lain yang lebih produktif di luar desa wisata yang juga menyerap masyarakat. Beberapa narasumber menjelaskan mobilisasi sumber daya ini dilakukan antara LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) perwakilan pemerintah desa dengan

pihak swasta yaitu PT. Uber Sari. seperti yang dijelaskan bapak Dewa Kaler bahwa pihak PT. Uber Sari selalu berkoordinasi terlebih dahulu perihal kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja maupun SDM dalam atraksi desa wisata.

Tahapan setelah bagian implementasi adalah tahapan *monitoring* dan evaluasi. Tahapan ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses *monitoring* dan evaluasi pengembangan desa wisata. Dalam proses ini bapak Dewa Kaler selaku *marketing* PT Uber Sari mengatakan pihak PT. Uber Sari melakukan evaluasi mandiri yang dilaporkan kepada pemerintah desa setiap bulannya. Hal ini dilakukan mandiri dari pihak swasta PT. Uber Sari. untuk partisipasi masyarakat diwujudkan dengan adanya rapat bersama atau duduk bersama antara pemerintah desa dengan mengundang pihak swasta yang mendirikan usaha di wilayah Desa Kasiman Kertalangu termasuk PT. Uber Sari. masyarakat diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti Subak, desa adat, dan kepala dusun. Evaluasi ini dilakukan tiap bulan dalam bentuk rapat koordinasi menurut bapak Kepala desa. Evaluasi dalam pengembangan desa wisata dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi mengenai keberjalanan keseluruhan Desa Kasiman Kertalangu.

Tahapan ke enam adalah Tahapan refleksi. Tahapan ini berbeda dengan tahapan *monitoring* dan evaluasi. Tahapan ini lebih menekankan pengembangan yang sudah terlaksana apakah sesuai dengan rencana awal dan bagaimana manfaat atau dampak positifnya terutama bagi masyarakat. Bapak Kepala desa mengatakan ada rapat atau diskusi untuk membahas apakah pengembangan desa wisata sudah sesuai dengan *masterplan* yang ada. Rapat ini diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk kepala dusun yang mengundang perwakilan perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Kasiman Kertalangu.

Tahapan terakhir dari pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan desa wisata Desa Budaya kertalangu adalah tahapan *feedback*. Pada tahapan *feedback*, saran atau rekomendasi berasal dari pihak di luar masyarakat dan desa wisata seperti wisatawan atau konsep pengembangan desa wisata dari lokasi lain. Menurut bapak Dewa Kaler banyak saran dari para wisatawan, salah satunya seperti wisatawan mengkritik mengenai kebersihan desa wisata. Wisatawan juga memberikan saran mengenai produk ataupun atraksi yang belum ada di pusat oleh-oleh tapi memiliki potensi yang baik untuk pengembangan Desa Budaya Kertalangu.



Gambar 3. Proses Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Kawasan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu

Sumber : Analisis (2013)

Analisis Dampak Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Dalam Pengembangan Ekowisata

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana dampak desa wisata yaitu Desa Budaya Kertalangu terhadap masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Dampak yang diterima masyarakat dibagi menjadi tiga bagian yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan.

Dampak yang pertama adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini dilihat dari tiga aspek yaitu adanya lapangan kerja, adanya peluang usaha,

dan bagaimana sistem kepemilikan lahan pertanian. Hampir semua kepala dusun menjawab ada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. ada yang bekerja sebagai penjual makanan dan minuman, ada yang bekerja di pusat SPA, ada yang bekerja penjaga kolam pancing, ada yang bekerja sebagai petugas kebersihan, satpam, dan penjaga toko pusat oleh-oleh. Dampak yang kedua dari sektor ekonomi adalah aspek adanya peluang usaha bagi masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Dampak ini seluruh kepala dusun menjawab merasakan adanya peningkatan peluang usaha. Hal ini sebatas merasakan, karena peluang usaha yang ada tidak dapat secara maksimal membantu ekonomi masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya masyarakat kertalangu yang membuka usaha di Desa Budaya Kertalangu. Dampak yang ketiga dalam indikator dampak ekonomi pengembangan desa wisata adalah kepemilikan lahan pertanian yang menjadi potensi utama pengembangan Desa Budaya Kertalangu. Di Desa Budaya Kertalangu, menurut berbagai sumber termasuk kepala dusun setiap banjar, lahan pertanian yang menjadi potensi utama masih milik masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. lahan pertanian ini tetap dimiliki masyarakat dan ada juga yang digarap oleh masyarakat.

Dampak yang kedua yaitu dampak sosial dibagi menjadi dua bagian yaitu dampak terhadap perubahan mata pencaharian dan dampak perubahan budaya. Yang pertama, masyarakat Desa Kasiman Kertalangu tidak melakukan perubahan mata pencaharian pada mata pemcaharian pokok. Masyarakat hanya mencoba mata pencaharian sampingan. Perubahan ini seperti awalnya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, namun dengan adanya Desa Budaya Kertalangu ibu-ibu rumah tangga mencoba membuka usaha menjual makanan dan minuman termasuk makanan dan minuman khas Bali. Selanjutnya pembahasan mengenai

dampak perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Dalam hal ini dapat dikatakan masyarakat Desa Kasiman Kertalangu tidak mengalami perubahan budaya terutama dari sisi sikap dan perilaku dengan adanya pengembangan Desa Budaya Kertalangu. masyarakat Desa Kasiman Kertalangu tetap berpegang teguh pada kebudayaan masyarakat Bali.

Dampak yang terakhir adalah penjelasan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya Desa Budaya Kertalangu. Dampak lingkungan ini ditunjukkan dengan aspek kebersihan, seperti apakah ada penyuluhan atau kampanye mengenai pentingnya kebersihan di lingkungan masyarakat. Selain mengenai kebersihan, polusi yang disebabkan oleh kemacetan kendaraan dengan adanya Desa Budaya Kertalangu. pada awal-awal pengembangan pihak PT Uber Sari mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan kita. PT Uber Sari melakukan penyuluhan ini dimaksud untuk meningkatkan masyarakat akan pentingnya menjaga alam termasuk lingkungan tempat tinggal juga lahan pertanian yang semakin tidak produktif. Selain itu pemerintah desa juga banyak melakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan. Dampak berikutnya adalah dampak polusi yang disebabkan oleh kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang datang ke Desa Budaya Kertalangu. semakin meningkat juga jumlah pengunjung desa wisata seperti yang ditunjukkan dalam data pariwisata Kota Denpasar. Oleh karena itu semakin meningkat juga jumlah kendaraan yang masuk dan keluar Desa Budaya Kertalangu. Mengingat Desa Budaya Kertalangu berada pada jalan strategis yaitu by pass Ngurah Rai, maka mobilitas di jalan tersebut terbilang tinggi, dan bus-bus yang datang ke Desa Budaya Kertalangu menjadi sumber kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai

PENUTUP

Dari pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Desa budaya Kertalangu banyak pihak-pihak yang berperan. Pihak-pihak yang ikut berperan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah (public sector), swasta (private sector), dan masyarakat. Pemerintah lebih berperan dalam memberikan dukungan kelembagaan termasuk kebijakan. Swasta yaitu PT Uber Sari berperan penting dalam hal pengelolaan Desa Budaya Kertalangu. PT Uber Sari juga berperan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dalam pengembangan Desa Budaya Kertalangu. Terakhir masyarakat tentunya berpartisipasi dalam memberikan dukungan sumber daya termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Peran-peran yang dijalankan masing-masing pihak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Peran-peran tersebut dijalankan pada setiap tahap pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu. Tahapan-tahapan tersebut bersifat siklus dan terus berjalan sepanjang pengembangan ekowisata. Tahapan tersebut terdiri dari 7 tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan feedback.

Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan ekowisata di Desa Budaya Kertalangu merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu syarat pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah adanya manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan ekowisata. Hal ini juga menjelaskan adanya dampak positif yang diterima masyarakat, selain hal tersebut ada juga dampak negatif yang diterima masyarakat. Dampak ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah lapangan

pekerjaan, adanya peningkatan kesempatan peluang usaha, dan tidak ada perubahan status kepemilikan lahan pertanian masyarakat Desa Kasiman Kertalangu. Selanjutnya dampak sosial dapat dilihat dari tidak adanya perubahan mata pencaharian pokok dan tidak adanya perubahan budaya termasuk adat istiadat serta perilaku masyarakat. Dampak terakhir yaitu dampak lingkungan dapat dilihat dari adanya usaha penyuluhan dan pelatihan mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu dampak polusi yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang berkunjung ke dalam kawasan ekowisata juga termasuk dampak lingkungan

REFERENSI

- Diamantis, D., & Ladkin, A. (1999). The links between sustainable tourism and ecotourism: a definitional and operational perspective. *Journal of Tourism Studies*, 10(2), 35.
- Maser, C. (1997). *Sustainable community development: Principles and concepts*. CRC Press.
- Chaskin, R. J. (2001). Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291–323.
- Damanik, J., & Weber, H. (2006). *Ecotourism planning: from theory to applications*. Yogyakarta: Andi.
- Dewi, Y. K., & Rosyidie, A. (2008). Kajian Pengembangan Kawasan Capolaga Sebagai Daya Tarik Ekowisata. *Journal of Regional and City Planning*, 19(2), 23–36.
- Duthy, S., & Bolo-Duthy, B. (2003). Empowering people's organizations in community-based forest management in the Philippines: The community organizing role of NGOs. *Annals of Tropical Research*, 25(2), 13–28.
- Fandeli, C. (2000). Pengertian dan konsep dasar ekowisata.

- Yogyakarta, Fakultas Kehutanan UGM.
- Lickorish, L. J., & Jenkins, C. L. (2007). *Introduction to tourism*. Routledge.
- Nugroho, I. (2011). Ecotourism and sustainable development. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata: Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Andi.
- Soemarwoto, O. (1997). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Cetakan ke-7*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wicaksono, A. W., & Darusman, T. (2001). *Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat Di Simpul Belajar. Bogor: Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat Yayasan Puter*.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan & pengembangan pariwisata. Jakarta: PT Pradnya Paramita*.

BIODATA PENULIS

Byna Kameswara Merupakan Associate Lecturer di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung. Bidang yang didalami adalah spasial Planning, Transpostasi Regional, GIS, Perencanaan dan Pengembangan Institusi.

Suhirman, merupakan Assistant Professor di Development Management and Policy Development research Group, Institut Teknologi Bandung. Bidang yang didalami Policy Development, Development Institutions, Participative Planning, Community Development.